

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2024 di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan secara sangat efektif dengan capaian kinerja diperkirakan berada pada kisaran 85–88%. Hal ini ditunjukkan oleh keterpenuhan seluruh indikator efektivitas menurut Sondang P. Siagian, mulai dari kejelasan tujuan, strategi pencapaian, analisis kebutuhan, perencanaan, penyusunan program, ketersediaan sarana prasarana, hingga pelaksanaan yang efisien dan tepat waktu.

Penerapan prinsip-prinsip Good Village Governance (GVG) juga telah berjalan secara konsisten, meliputi partisipasi aktif masyarakat melalui Musyawarah Desa, transparansi dalam publikasi anggaran dan kegiatan, akuntabilitas melalui dokumentasi keuangan yang lengkap, responsivitas terhadap aspirasi lokal, penerapan keadilan dan inklusivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi desa. Meskipun demikian, aspek pengawasan partisipatif dari masyarakat umum masih dapat ditingkatkan untuk memperkuat akuntabilitas. ★ ★ ★

Dampak dari efektivitas pengelolaan Dana Desa terbukti bersifat multidimensi. Pada aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur memperlancar distribusi hasil pertanian, membuka peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan warga melalui sistem swakelola. Dari sisi sosial dan kelembagaan, terjalin kepercayaan publik yang lebih kuat, meningkatnya partisipasi warga, serta sinergi

antar-lembaga desa. Dampak lingkungan terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya sanitasi, serta terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Di sektor pertanian, infrastruktur yang memadai mendukung produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen. Sementara itu, peningkatan kualitas hidup warga tercermin dari kemudahan akses pendidikan, kesehatan, serta aktivitas sosial dan keagamaan.

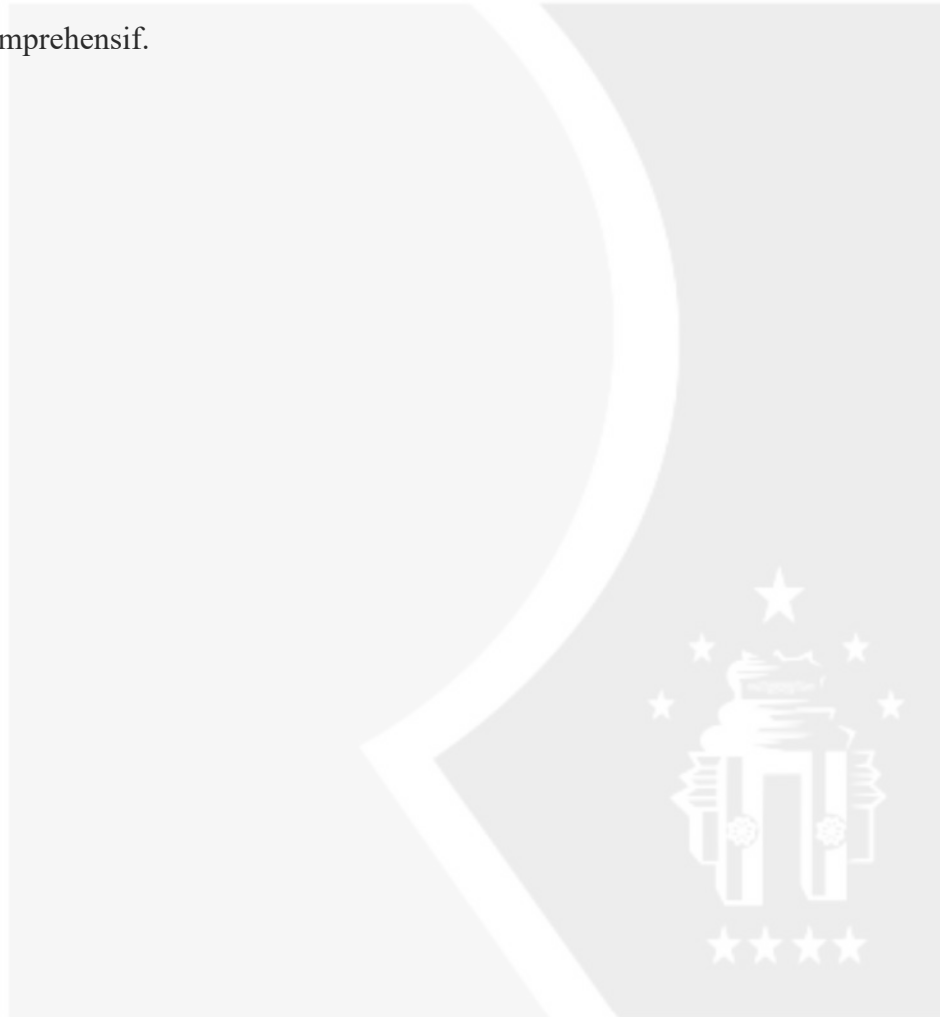
Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa di Desa Karangsuko pada tahun 2024 bukan hanya menghasilkan output fisik berupa infrastruktur yang memadai, tetapi juga memberikan outcome dan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Dana Desa, apabila dikelola dengan prinsip GVG dan strategi yang tepat sasaran, dapat menjadi instrumen pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait. Pemerintah Desa Karangsuko disarankan untuk terus meningkatkan pelibatan masyarakat tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, guna mewujudkan tata kelola yang lebih partisipatif dan transparan.

Pemerintah daerah dan pendamping desa diharapkan untuk memperkuat pembinaan dan supervisi terhadap pemerintah desa dalam hal pelaksanaan teknis

pengelolaan Dana Desa serta mendorong terwujudnya budaya administratif yang tertib dan akuntabel. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian dengan menelaah lebih dalam tentang dampak jangka panjang pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta mengevaluasi aspek keberlanjutan pembangunan berbasis Dana Desa secara lebih komprehensif.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Keahlian DPR Ri. (2020). *Efektivitas Dana Desa*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi Keempat, Terjemahan Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. Anik Yuesti, D. R. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawa.
- Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jurnal

- Achmad Faisal Daulay, M. A. H. B. (2015). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas keuangan dan pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhoksumawe. *Magister Akuntansi*, 4(3), 39–48.
- Ananda Naufal Zaki, M. O. L. Y. (2023). Efektivitas pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif teori keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 23–37. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOB>
- Ariyanto, A., Nugroho, H., & Lestari, P. (2024). Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Pembangunan Desa*, 12(1), 45–58.
- Azfirmawarman, D., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2024). Transparansi keuangan daerah dalam era desentralisasi fiskal. *Prediksi*, 23(3), 222–230.
- Baskoro, A. (2025). Strengthening Good Village Governance strategy: Transparency, accountability, and inclusive rural development. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 5(1), 39–50. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.39-50>
- Dr. Anik Yuesti, D. R. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawa.
- Lioni, N. Z. (2024). Good Village Governance dalam mewujudkan kemandirian desa di Kepenghuluan Sintong Makmur Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Mahasiswa Pemerintah*, 1(2).
- Maria Elisa Mano. (2022). Efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan.
- Martinus Bili. (2024). Penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 258–269.

- Mulyana, M. A. H. (2024). Efektivitas Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan affiliation. *JKP (Jurnal Ekonomi Publik)*, 11(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/>
- Nurmalasari, D., & Irawan Supriyadi, E. (n.d.). Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
- Pratiwi, R., Kurniawan, T., & Sari, M. (2022). Analisis prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 211–225.
- Putri Elit Tri, G. W. N. (2022). Analisa penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5(3).
- Rafika Sari. (2014). Dampak kebijakan desentralisasi fiskal pada daerah tertinggal di Indonesia (Fiscal decentralization policy on disadvantaged regions in Indonesia). *Jurnal DPR RI*, 5(1).
- Ramadhan, F., Hidayat, M., & Wibowo, A. (2020). Swakelola pembangunan desa dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 134–147.
- Safitri, A. D., Negeri, I., Abdurrahman, K. H., & Pekalongan, W. (2023). Implementasi prinsip Good Governance dalam tata kelola pembangunan desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2).
- Siregar, R., & Lubis, H. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berbasis Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4(2), 101–115.
- Sutia Yunanda. (2025). Dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 9(2).
- Wirayudha, M. H., Raudatillah, R., & Pauzi, P. (2025). Analisis efektivitas penggunaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan. *Journal of Economics Development Research*, 1(1), 38–48. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i1.59>
- Wulandari, D., & Hidayat, R. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 55–68.

Regulasi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Website

<https://kemendagri.go.id>

<https://www.kemenkeu.go.id>

<https://www.kemendesa.go.id>

<https://peraturan.go.id>

<https://idm.kemendesa.go.id>

<https://www.bpkp.go.id>



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT